



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : POLITEKNIK NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BEAUTY ANGGRAHENY IKAWANTY
2. Jabatan : KPS D3 TEKNIK ELEKTRONIKA
3. NHK : 907761

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/100 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah Seluas 155 m2 di KAB / KOTA KOTA BATU , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 215.000.000

1. MOBIL, HONDA HRV MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 60.900.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.164.719

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.281.064.719

III. HUTANG Rp. 60.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.221.064.719

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.